

**MEWUJUDKAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI
JAWA TENGAH SEBAGAI LEMBAGA LAYANAN
PENGAWASAN YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL,
RESPONSIBLE, INDEPENDEN DAN TERPERCAYA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1 Manajemen
Program Studi Manajemen**



Disusun Oleh:

Elisa Fitri Rahmawati

Nim : 30401900099

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEMARANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**MEWUJUDKAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA
TENGAH SEBAGAI LEMBAGA LAYANAN PENGAWASAN
YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIBLE,
INDEPENDEN DAN TERPERCAYA**

Disusun Oleh :

Elisa Fitri Rahmawati

Nim : 30401900099

Telah Disetujui oleh Pembimbing dan Selanjutnya dapat Diajukan ke Hadapan
Sidang Panitia Ujian **Sripsi**

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 10 Februari 2023

Pembimbing

Dosen Pembimbing Lapangan



Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D

NIDN. 210403049

Dosen Supervisor



Djoko Moeljanto, S.E

NIP.19790508 199903001

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

MEWUJUDKAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI LEMBAGA LAYANAN PENGAWASAN YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIBLE, INDEPENDEN DAN TERPERCAYA

Disusun Oleh :

Elisa Fitri Rahmawati

NIM : 30401900099


Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 2 Maret 2023

Pembimbing,

Penguji I


Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D


Prof. Dr. Nunung Ghoniyah, MM

NIDN. 0629026002

NIDN. 0607056203

Penguji II


UNISSULA

Drs. Bomber Joko Setyo Utomo, MM

NIDN. 023095801

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Manajemen

Semarang, 28 Maret 2023

Ketua Program Studi Manajemen


Dr. Lutfi Nurcholis, S.T., S.E., M.M

NIDN. 0623036901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elisa Fitri Rahmawati

NIM : 30401900099

Menyatakan dengan sesungguhnya Pernyataan Keaslian Skripsi berjudul “Mewujudkan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Sebagai Lembaga Layanan Pengawasan Yang Transparan, Akuntabel, Responsible, Independen Dan Terpercaya” ialah karya saya sendiri bukanlah hasil plagiarisme atau duplikasi karya orang lain. Pendapat orang lain dalam artikel ini dikutip sesuai dengan prinsip-prinsip etika ilmiah. ,jika artikel ini terbukti menjiplak karya orang lain, saya bersedia menghadapi sanksi hukum..

Semarang, 10 Februari April 2023

Yang menyatakan,



Elisa Fitri Rahmawati

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elisa Fitri Rahmawati

Program Studi : S1 Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**“MEWUJUDKAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
SEBAGAI LEMBAGA LAYANAN PENGAWASAN YANG
TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIBLE, INDEPENDEN DAN
TERPERCAYA”**

Dan menyetujui bahwa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung memiliki dan memberi Anda kebebasan hak non-eksklusif untuk menyimpan, menautkan, mengelola, dan menerbitkan database di internet atau media lain untuk tujuan pendidikan, kepemilikan hak cipta Tetapkan nama penulis sebagai penulis.

Saya mengatakannya dengan sepenuh hati. Ke depan, jika terbukti ada pelanggaran hak cipta atau plagiarisme dalam penelitian ilmiah ini, segala macam tuntutan hukum akan saya ajukan sendiri tanpa melibatkan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung..

Semarang, 8 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Elisa Fitri Rahmawati

NIM 30401900099

ABSTRAK

Mewujudkan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Sebagai Lembaga Pengawasan yang Transparan, Akuntabel, Responsible, Independen dan Terpercaya. Laporan magang MB-KM ini ditunjukkan untuk membantu meningkatkan kinerja pengawasan pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Untuk keperluan tersebut, pengamatan dan pengumpulan data telah dilakukan selama 4 bulan magang di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Kajian teori secara kritis terkait pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik - praktik KKN.

Kata Kunci : Good Corporate Governance, Good Governance, Pengawasan, Transparan, Akuntabel, Responsible, Independen, Terpercaya.

ABSTRACT

Realizing BPKP Representatives of Central Java Province as a Transparent, Accountability, Responsibility, Independence and reliable Supervisory Agency. This MB-KM internship report is shown to help improve supervisory performance at BPKP Representatives of Central Java Province. For this purpose, observations and data collection have been carried out for 4 months of internship at the BPKP Representative of Central Java Province. Critical theoretical studies related to supervision of government administration are needed to ensure that the implementation of government activities goes according to plan and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. In addition, in order to realize good governance and clean government, supervision is also needed to support the administration of government that is effective and efficient, transparent, accountable, and clean and free from KKN practices.

Keywords: Good Corporate Governance, Good Governance, Supervision, Transparent, Accountable, Responsible, Independent, Trusted.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun laporan kegiatan magang di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Penulisan laporan magang ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan nilai magang pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB – KM). Tersusunnya laporan magang ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan magang ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, serta memberikan arahan hingga tahap penyusunan laporan magang. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung
3. Dr. Lutfi Nurcholis, S.T., S.E., MM selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
4. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta nasihat demi kesempurnaan Laporan Magang ini. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

5. Tri Handoyo, AK., M.B.A selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan magang.
6. Djoko Moeljanto, S.E selaku Kasubbag Kepegawaian Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dan Dosen Supervisor yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama melaksanakan magang.
7. Seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu penulis selama melaksanakan magang.
8. Kepada Bapak dan Ibu penulis yang selalu menjadi inspirasi dalam hidupku atas segala perjuangan, doa dan ketabahan, nasihat dan kasih sayangnya yang tidak akan terbalas dan akan menjadi motivasi untuk terus bersemangat.
9. Teman – teman seperjuangan bimbingan dan teman – teman manajemen yang tak henti hentinya memberikan motivasi dan saling mengingatkan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan magang ini, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak senantiasa penulis harapkan untuk bekal penulis dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi mereka yang membacanya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Semarang, 9 Februari 2023



Elisa Fitri Rahmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Magang.....	4
1.4 Sistematika Laporan.....	5
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG.....	7
2.1 Gambaran Umum Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.....	7
2.1.1 Visi dan Misi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.....	8

2.1.2	Tugas Pokok dan Fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah .	8
2.1.3	Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.....	10
2.2	Aktivitas Magang	23
2.2.1	Tempat Pelaksanaan Magang	23
2.2.2	Waktu Pelaksanaan Magang.....	24
2.2.3	Tata Tertib Magang	24
2.2.4	Kegiatan Magang.....	25
BAB III IDENTIFIKASI MASALAH		30
3.1	Rendahnya Transparansi di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	30
3.2	Rendahnya Akuntabilitas di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	30
BAB IV KAJIAN PUSTAKA		32
4.1	Pengawasan	32
4.1.1.	Definisi Pengawasan.....	32
4.2	GCG	33
4.2.1.	Latar Belakang GCG	33
4.2.2.	Definisi Good Corporate Governance	34
4.2.3.	Prinsip – prinsip Good Corporate Governance.....	34
4.2.4.	Manfaat Penerapan Good Corporate Governance	37
BAB V METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA		39

5.1	Metode dan Jenis Penelitian.....	39
5.2	Jenis dan Sumber Data	39
5.3	Teknik Pengumpulan Data.....	39
5.4	Metoda Analisis Data.....	40
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		43
6.1	Rendahnya Tingkat Transparan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.....	43
6.2	Rendahnya Tingkat Akuntabilitas di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.....	45
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....		47
7.1	Kesimpulan.....	47
7.2	Rekomendasi	48
7.2.1.	Prinsip Transparan.....	48
7.2.2	Prinsip Akuntabilitas	49
BAB VIII REFLEKSI DIRI.....		50
8.1	Hal-Hal Positif yang Relevan Dengan Magang	50
8.2	Rencana Perbaikan atau Pengembangan Diri, Karir dan Pendidikan	51
DAFTAR PUSTAKA		52

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	54
Lampiran 1 : Identitas peserta magang	54
Lampiran 2 : Daftar hadir peserta magang	55
Lampiran 3 : Log Book peserta magang.....	64
Lampiran 4 : Proses pembimbingan laporan magang oleh DPL	72
Lampiran 5 : Proses Pembimbingan oleh Dosen Supervisor.....	74
Lampiran 6 : Hasil Wawancara	75
Lampiran 7 : Bukti Dokumentasi Kegiatan Magang di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi ini memiliki dampak yang sangat besar di Indonesia, tidak hanya mengubah orang yang berkuasa, tetapi juga pengawasan dan tata kelola. Badan Pengawasan Pembangunan Keuangan (BPKP) merupakan salah satu lembaga pengawasan internal pemerintah dan berperan penting dalam pengawasan. Sejak Orde Baru (Orba), lembaga ini diberi kekuasaan pengawasan tertinggi di Indonesia (Suseno, 2010). Banyak terjadi penyelewengan oleh beberapa oknum, baik oleh pemerintah maupun pimpinan BUMN/BUMD, dalam pengelolaan keuangan negara yang mengakibatkan kerugian negara setiap tahunnya. Oleh karena itu, publik harus mempertanyakan peran kontrol dan sejauh mana peran regulator dalam pengelolaan keuangan negara (Kelvianto & Mustamu, 2018).

Pengawasan manajemen pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang direncanakan. Lebih jauh lagi, tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan memerlukan pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, transparan dan bebas KKN.is.

Pemantauan adalah kegiatan praktis, dilakukan, dilakukan, atau diselenggarakan sehubungan dengan apa yang diinginkan, direncanakan, atau diperlukan. Tugas mengelola keuangan publik jelas berbeda dengan tugas menegakkan good governance. Dalam Revisi, definisi keuangan publik mencakup semua fungsi otoritas keuangan publik sebagai bagian dari tugas dan mandatnya,

termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban dan audit keuangan publik. BPKP menggambarkan tata kelola perusahaan sebagai komitmen, aturan main, dan praktik menjalankan bisnis secara adil dan beretika. Prinsip-prinsip pengembangan, penerapan, dan evaluasi GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kepercayaan.

Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini jauh lebih kompleks dan kompleks. Tugas pemerintah yang seharusnya menjadi contoh bagi rakyat justru terpuruk. Keberadaan Good Law yang selama ini diagung-agungkan, atau kadang disebut Good Law, ternyata di sini masih berupa mimpi dan rumor. Indonesia perlu bangun lebih awal dari tidur panjangnya. Revolusi harus terjadi dengan segala cara, dan produk revolusi apa pun akan memenuhi kepentingan partai politik, faksi, dan kelompok orang. Tata kelola negara yang baik, bagaimanapun, adalah perhatian utama. Tentu saja transparansi bisa menjadi solusi, namun bukan satu-satunya cara untuk mencapai good governance (Maryam, 2016).

Selanjutnya, dalam rangka mendorong praktik good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara profesional, terbuka, dan transparan sesuai dengan prinsip konstitusi (Setiawan, 2019). Ada beberapa kategori pengawasan (control) atas pengelolaan keuangan negara, antara lain pengawasan inheren, pengawasan internal, dan pengawasan eksternal. Di sisi lain, pengendalian intern secara sempit diartikan sebagai pengawasan melekat. Dalam pengertian pengawasan intern, dalam arti sempit, Otoritas Pengawasan Pembangunan Keuangan termasuk dalam pengertian pengawasan yang sempit, menurut Perpres No. 192 Tahun 2014 ;Badan

Pembangunan Ekonomi (BPKP) adalah lembaga pengawasan dalam negeri. (2) BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah kekuasaan Presiden dan tunduk pada kekuasaan Presiden.

Pengertian Good Governance Menurut Peraturan Pemerintah No. 2 101 Tahun 2000 Good Governance adalah profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan yang baik, demokrasi, efisiensi, efektifitas dan kepastian hukum. orang. Menurut LAN, BPKP, good governance adalah kegiatan pemerintahan nasional yang efektif dan efisien, dan good governance dengan menjaga sinergi interaksi yang konstruktif antara wilayah negara, swasta dan masyarakat (society). Tata kelola perusahaan yang efektif dimaksudkan untuk mengelola dan mengelola operasi pemerintah dengan cara yang memberikan wewenang dan akuntabilitas yang diperlukan untuk kelangsungan hidup perusahaan (TBK, 2020).

Secara keseluruhan, tata kelola perusahaan yang baik didasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas dan supremasi hukum, secara sinergis dan efektif dengan pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. hubungan dan dapat diterima oleh semua orang. Tuntutan bangsa akan good governance terus mencari bentuk dan model yang dapat memenuhi segala kebutuhan seluruh rakyat.

Berdasarkan uraian diatas kami tertarik untuk mengkaji tentang “
**MEWUJUDKAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
SEBAGAI LEMBAGA LAYANAN PENGAWASAN YANG TRANSPARAN,
AKUNTABEL, RESPONSIBLE, INDEPENDEN DAN TERPERCAYA** “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul laporan maka dapat dikemukakan perumusan masalah adalah Bagaimana mewujudkan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang GCG, adapun pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mewujudkan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang Transparan?
2. Bagaimana mewujudkan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang Akuntabel ?
3. Bagaimana mewujudkan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang Responsible ?
4. Bagaimana mewujudkan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang Independen ?
5. Bagaimana mewujudkan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang Terpercaya ?

1.3 Tujuan Magang

Tujuan magang MBKM adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui sejauh mana Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menjadi lembaga yang Transparan
2. Untuk mengetahui sejauh mana Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menjadi lembaga yang Akuntabel
3. Untuk mengetahui sejauh mana Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menjadi lembaga yang Responsible

4. Untuk mengetahui sejauh mana Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menjadi lembaga yang Independen
5. Untuk mengetahui sejauh mana Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menjadi lembaga yang Terpercaya

1.4 Sistematika Laporan

Sistematika laporan magang ini disusun sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan tentang permasalahan, latar belakang kami memilih topik tersebut, permasalahan yang muncul, rumusan masalah dan tujuan penulisan laporan.

Bab II : Profil Organisasi dan Aktivitas Magang, menjelaskan secara ringkas tugas dan fungsi, struktur organisasi, organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah serta penjelasan aktivitas peneliti selama kegiatan magang

Bab III : Identifikasi Masalah, menjelaskan berbagai temuan masalah yang ada pada subjek penelitian Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah berisi uraian terkait prinsip Good Corporate Governance

Bab IV : Kajian Pustaka, menjelaskan uraian tentang teori yang akan digunakan penulis dalam menyusun laporan, pengertian dan definisi teori yang digunakan, prinsip – prinsip dan manfaat serta kendala dalam menggunakan teori Good Corporate Governance.

Bab V : Metoda Pengumpulan dan Analisis Data, menjelaskan metoda yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan informasi dari kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

Bab VI : Analisis dan Pembahasan, menguraikan kembali masalah yang menjadi topik pembahasan dengan menggunakan teori yang relevan untuk menjelaskan dan membandingkan dengan kasus yang diangkat serta menyebutkan referensi yang valid.

Bab VII : Kesimpulan dan Rekomendasi, berisi kesimpulan mengenai pendapat tentang kasus atau masalah yang dianalisis dan rekomendasi terkait hasil analisis bab 5 serta rekomendasi hal-hal yang perlu diperbaiki organisasi tempat magang dan program studi.

Bab VIII : Refleksi Diri, penjabaran tentang hal-hal positif yang diterima selama magang



BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Gambaran Umum Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Sebagai salah satu pengawas internal pemerintah, BPKP Perwakilan Jawa Tengah merupakan badan vertikal BPKP daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur BPKP. Perwakilan BPKP di Jawa Tengah dipimpin oleh seorang ketua yaitu Tori Handyo dibawah pimpinan BPKP. Wilayah kerjanya meliputi wilayah Jawa Tengah dan akan melibatkan pemangku kepentingan dari seluruh instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah dan instansi vertikal lainnya serta BUMN/BUMD/BHMN/BLU.

Perwakilan BPKP Jawa Tengah sebagai Pemerhati Internal Pemerintah (APIP) akan menjadi garda terdepan dalam implementasi transaksi keuangan nasional/daerah yang berkualitas tinggi dan inisiatif pemerintah untuk mewujudkan good governance mendorong inovasi dan mendorong efisiensi. Bersih dan bebas KKN.

Perwakilan BPKP Jateng melayani 36 kantor pemda. Dari dana tersebut, Perka BPKP No. Hingga November 2013, 30 pemerintah daerah telah didukung oleh perwakilan BPKP di Jawa Tengah. Enam negara bagian diserahkan kepada perwakilan BPKP di D.I. di negara-negara. Yogyakarta adalah negaranya. Enam pemerintah daerah yang dipertimbangkan adalah Pemda Magelang, Pemkab Magelang, Pemkab Klaten, Pemkab Ciracha, Pemkab Kebumen, dan Pemkab Purworejo.

2.1.1 Visi dan Misi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

1. Visi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Menjadi auditor internal pemerintah berkelas dunia dan trusted advisor pemerintah untuk meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

2. Misi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

- 1) Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional; dan
- 2) Membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

1. Tugas Pokok Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Tugas Pokok Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut;

- 1) Melakukan kajian internal terhadap pendanaan negara dan/atau daerah untuk kegiatan lintas departemen.
- 2) Pengawasan terhadap Kas Negara
- 3) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas Presiden atau atas permintaan Kepala Daerah;
- 4) Membuat ketentuan untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dan
- 5) Melaksanakan dan menegakkan tanggung jawab lain di bidang pengawasan dan pengembangan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

- 1) Perencanaan dan persiapan program.
- 2) Melaksanakan dukungan pelaksanaan SPIP.
- 3) Ini mengawasi administrasi pendapatan dan pengeluaran publik, pengelolaan aset dan properti pemerintah publik sesuai dengan kebutuhan publik.
- 4) Menjamin terlaksananya mandat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
- 5) Memantau transaksi keuangan utama di bidang pekerjaan.
- 6) Berpartisipasi dalam pengembangan laporan kinerja lembaga.
- 7) Membantu pelaporan keuangan daerah.
- 8) Memberikan dukungan terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah (BUMN, BUMD) dan fungsi lembaga pemerintah pusat/daerah (BUMN, BUMD).
- 9) Pengawasan badan usaha milik negara, kepentingan pemerintah dalam entitas lain, perusahaan daerah atas permintaan pemangku kepentingan, dan kontraktor untuk kontrak bagi hasil dan kerjasama, pinjaman luar negeri dan hibah yang diterima oleh pemerintah pusat. sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- 10) Mengevaluasi praktik tata kelola perusahaan dan laporan kinerja yang sesuai untuk perusahaan milik negara, posisi kepentingan pemerintah lainnya, dan perusahaan publik, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan sebagaimana diminta oleh pemangku kepentingan.

- 11) Pemeriksaan investigasi terhadap penyimpangan yang merugikan keuangan negara, badan usaha milik negara, dan lembaga kepentingan pemerintah lainnya, peninjauan pembatasan pembangunan yang sehat, perhitungan dan audit kerugian negara, perhitungan kerugian negara oleh penyelidik internal dan badan pemerintah lainnya untuk memberikan bantuan sesuai kebutuhan oleh hukum.
- 12) Menganalisis hasil pemantauan, menyiapkan laporan, dan melakukan kontrol kualitas pemantauan
- 13) Peran administratif perwakilan BPKP.

2.1.3 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Perwakilan BPKP Jawa Tengah merupakan badan tetap BPKP di daerah yang diarahkan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal BPKP. Berdasarkan Surat Keputusan BPKP No. 17 tanggal 17 November 2016, struktur organisasi perunding BPKP di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:



Sumber : Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi
Jawa Tengah

2.1.3.1. Kepala Perwakilan

Perwakilan BPKP dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai tugas memimpin Perwakilan BPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.1.3.2. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program Bagian Tata Usaha, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan dan penyusunan laporan Bagian Tata Usaha dan laporan Program Pelatihan Mandiri Perwakilan.

Dalam menjalankan tugasnya bagian tata usaha membawahi beberapa Sub Bagian, yaitu:

1) Sub Koordinator Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai serta penyusunan Laporan Bagian Tata Usaha dan Laporan Program Pelatihan Mandiri Perwakilan.

Uraian kegiatan- kegiatan bagian ini diantaranya:

1. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
2. Pemrosesan Kenaikan Pangkat Pegawai
3. Peningkatan kemampuan SDM dengan mengirimkan pegawai ke Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP.
4. Pemrosesan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor

Jenis Diklat yang dapat diselenggarakan bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (PUSDIKLATWAS) BPKP antara lain :

1. Diklat Analisis Pemecahan Masalah
2. Diklat Audit Berbasis Resiko
3. Diklat audit Forensik
4. Diklat Audit Investigatif
5. Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
6. Diklat Penulisan Laporan Hasil Audit yang Efektif
7. Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dll

2) Sub Koordinator Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Bagian Tata Usaha, dan Anggaran Perwakilan serta pengelolaan urusan keuangan.

- a. Perencanaan Anggaran melalui Anggaran Berbasis Kinerja
 - b. Pengelolaan keuangan dengan mengimplementasikan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA)
 - c. Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
 - d. Penyusunan Laporan Bulanan tentang Revisi Anggaran
 - e. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan
 - f. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
 - g. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
- 3) Sub Koordinator Pengelola BMN, Kearsipan dan Rumah Tangga**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, perlengkapan, urusan dalam, rumah tangga dan pengelolaan perpustakaan.

- a. Pengelolaan Inventarisasi Kantor dan Aplikasi Persediaan dengan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)
- b. Melaksanakan Kegiatan pengadaan dan penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP
- c. Pengembangan Website Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dengan alamat : <http://bcpk.go.id/jateng> dan melalui Website yang dikelola oleh BPKP Pusat yaitu <http://www.bcpk.go.id>
- d. Pengelolaan Kehumasan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
- e. Pengelolaan Energi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

2.1.3.3. Koordinator Pengawasan dan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP)

JFA Group Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Perwakilan BPKP dari IPP Bidang Provinsi Jawa Tengah akan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan BPKP, khususnya audit, review, evaluasi, monitoring dan pengawasan lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban instansi pemerintah pusat. Pembangunan negara, pembangunan daerah dan/atau kegiatan lain yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari APBN dan belanja keuangan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Perpres 192/2014.

Proses ini terdiri dari langkah-langkah berikut;

1) Pengawasan Proses Pembangunan Nasional

Pengawasan proses pembangunan nasional dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan berikut:

1. Audit Keuangan

Audit keuangan dilakukan misalnya melalui audit keuangan terhadap program/proyek pendukung yang dibiayai pinjaman dan/atau bantuan luar negeri yang berlokasi di Jawa Tengah yang disediakan oleh donor (borrower) yang sah:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan;
3. Program PAMSIMAS (Loan IBRD NO. 8259-ID);
4. Second Water Resource & Irrigation Sector Management Project (WISMP II) Loan IBRD No 8027-ID;
5. Strategic Roads Infrastructure Project(SRIP) Loan IBRD No. 4834-IND;
6. Dam Operational Improvement and Safety Project(DOISP) Loan IBRD No. 7669-ID;

2. Audit Kinerja

Audit kinerja dilakukan terhadap program atau kegiatan yang disepakati mitra kerja sebagai wahana untuk menilai pencapaian tingkat keberhasilan kegiatan/program, mengidentifikasi masalah, dan merekomendasikan perbaikan kinerja. Misalnya audit kinerja yang dilakukan di bawah Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (RPDP), dan lain-lain.

3. Audit Operasional

Audit operasional dilakukan untuk menilai kinerja program/kegiatan dan menilai tingkat efektivitas, efisiensi dan kelayakan ekonomi kegiatan/program. Hasil audit operasional diharapkan dapat memberikan arahan kepada penanggung jawab program/kegiatan untuk memastikan tercapainya tujuan program. Audit operasional meliputi audit Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawasul, audit penggunaan dana cadangan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

4. Audit Tujuan Tertentu

Sektor IPP juga dapat melakukan audit yang bertujuan untuk menarik kesimpulan tentang kegiatan dan program yang dilakukan dalam batas-batas tertentu yang disepakati. Misalnya, pemeriksaan kekurangan pembayaran tunjangan dosen dan pegawai. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.

5. Monitoring dan Evaluasi

IPP Council juga menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi prioritas program pemerintah. Kegiatan (100 kegiatan prioritas) yang akan dilaksanakan dalam pemantauan/penagihan kegiatan program prioritas nasional di Kementerian/Lembaga di bawah Departemen Kepegawaian Kepresidenan yang berlokasi di Sampling Jawa Tengah meliputi: Memberikan bantuan melalui kartu Indonesia pintar kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Penyaluran Kartu Sano Indonesia (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Baik (KKS) kepada keluarga kurang mampu dan masyarakat bermasalah kesejahteraan. Pemberian beasiswa dan dana penelitian di

perguruan tinggi. Pemberian tunjangan khusus kepada guru jarak jauh. Kegiatan lainnya antara lain evaluasi terhadap barang sitaan dan pengelolaan barang sitaan di Kementerian Hukum dan HAM (penjarahan dalam negeri), Kejaksaan Agung RI, dan Polri, serta monitoring tahunan pelaksanaan program swasembada pangan di Jawa Tengah. termasuk.

2) Upaya Peningkatan Ruang Fiskal

Upaya peningkatan ruang fiskal antara lain dilakukan melalui audit PNBPN. Kegiatan yang dilakukan antara lain audit pengelolaan PNBPN di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Kesehatan Pelabuhan (Kemenkes) dan Badan Pertanahan Provinsi (BPN).

3) Pengamanan Keuangan Negara

Kegiatan di Kas Negara dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan di bidang pemeriksaan keuangan, pemeriksaan ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan. Ruang lingkup pemeriksaan meliputi manajemen keuangan, kepatuhan dan efisiensi terhadap persyaratan hukum, dan apakah hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi kerugian keuangan negara.

4) Peningkatan Governance

Pedoman peningkatan/penguatan proses yang dilakukan di departemen pengawasan IPP meliputi lokakarya, diskusi kelompok terarah (FGD), pelatihan, atau pelatihan pemangku kepentingan terkait peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, termasuk narasumber pengelolaan keuangan. , atau penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 . Kegiatannya antara lain membantu unit kerja kementerian/lembaga

dalam penyusunan dan penelaahan pelaporan keuangan dan penjaminan mutu di BMN. Menegosiasikan prosedur inventarisasi dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah.

2.1.3.4. Koordinator Pengawasan dan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)

Kelompok Promosi Pemerintah Daerah JFA bertanggung jawab untuk mengawasi pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan.

1) Sistim Informasi Manajemen Keuangan daerah (SIMDA)

Membangun akuntabilitas keuangan negara di antara pemerintah provinsi/kabupaten/kota, perwakilan BPKP Jawa Tengah memainkan sejumlah peran dalam penganggaran, administrasi, pelaporan keuangan, pengelolaan aset daerah, dan penggajian pejabat daerah beberapa prefektur/kota. Produk terapan yang terkenal dengan kinerja unggulnya meliputi:

1. SIMDA Keuangan
2. SIMDA Barang Milik Daerah
3. SIMDA Gaji

2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem manajemen dalam pemerintahan telah berkembang dari lingkungan pengawasan melekat (Waskat) ke sistem baru yang mengutamakan hard law dan menegakkan soft law daripada hard law. Dilanjutkan dengan bidang tanggung jawab pejabat daerah yang mewakili BPKP Jateng. Negara mempromosikan pemerintah daerah melalui cara-cara berikut :

1. Sosialisasi

2. Pelatihan kepada Satgas SPIP Pemda
3. Asistensi/Bantuan/Bimtek perancangan peraturan gub/bupati/walikota.
4. Asistensi/Bantuan/Bimtek perancangan juklak peraturan gub/bupati/walikota.
5. Diagnosis Assesment (DA) SPIP.
6. Workshop penerapan awal SPIP pada SKPD/Pemda
7. Asistensi/Bantuan/Bimtek penerapan awal pada SKPD/Pemda.
8. Reviu/analisis penerapan awal SPIP.
9. Konsultasi perancangan kegiatan penerapan SPIP pada SKPD dan atau Pemda.

3) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Bentuk layanan yang diberikan berupa :

1. Asistensi penyusunan system dan prosedur akuntansi keuangan daerah.
2. Asistensi penyusunan kebijakan akuntansi

4) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dukungan BPKP terhadap implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP), bimbingan teknis, pendampingan, konsultasi, dan evaluasi SAKIP mendorong akuntabilitas kinerja instansi.

Formulir layanan SAKIP meliputi:

1. Asistensi Penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Asistensi Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. Asistensi Evaluasi SAKIP SKPD

- 5) **Fasilitas Pengelolaan Aset Daerah**
- 6) **Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM), Rencana Strategik SKPD dan Rencana Kerja Tahunan**
- 7) **Fasilitasi Penyusunan Penganggaran seperti penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)**
- 8) **Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan Daerah**
- 9) **Fasilitasi penyusunan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah.**

2.1.3.5 Koordinator Pengawasan dan Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara (AN)

JFA Group merayakan peran Akuntan Hitam. Menu program, rincian praktik tata kela yang meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang benar, laporan tanggapan yang tepat terhadap energi BUMN dan entitas yang dipelihara oleh orang tua dan BUMD untuk dipelihara. hasil audit.

1. Audit Umum atas Laporan Keuangan

Proses audit atas laporan keuangan suatu entitas yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, serta pemberian pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan. sesuai peraturan.

Audit umum atas laporan keuangan dilakukan atas permintaan pemangku kepentingan dan sesuai dengan persyaratan masing-masing perusahaan.

2. Evaluasi atas Kinerja Badan Usaha

Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, kami sedang mengembangkan sistem kinerja yang mengevaluasi status pencapaian kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu dan merekomendasikan perbaikan.

Penilaian kinerja entitas dilakukan berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia kepada BPKP dan pedoman BUMN/D terkait, yang mengatur antara lain tentang proses penilaian akuntabilitas kinerja perusahaan dan daerah. -
Kepemilikan Perusahaan.

Evaluasi kinerja meliputi:

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),
2. Rumah Sakit Daerah,
3. Bank Perkreditan Rakyat,
4. BUMN Sektor perkebunan,
5. Ketahanan Swasembada Pangan (Bidang Ketahanan Pangan),

3. Asistensi Corporate Governance

Sehubungan dengan upaya mengembangkan dan membangun tata kelola perusahaan yang baik dalam suatu entitas, kami menyediakan jasa konsultasi untuk menyiapkan infrastruktur tata kelola perusahaan sesuai dengan kebutuhan entitas.

Termasuk dukungan tata kelola perusahaan:

1. Penyusunan Key Performance Indikator.
2. Penyusunan Corporate Plan.
3. Penyusunan Manajemen Resiko.
4. Penyusunan SOP Pengadaan barang dan jasa.
5. Penyusunan SOP Penilaian kinerja pegawai.

6. Penyusunan Laporan keuangan.
7. Penyusunan tarif air minum.
8. Inventarisasi aset
9. Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi
10. Sistem Informasi Manajemen Aset
11. Asistensi lain yang berkaitan dengan peningkatan GCG

4. Evaluasi Implementasi Corporate Governance

Kami meninjau dan menganalisis proses tata kelola entitas, mendemonstrasikan pencapaian nilai dan citra perusahaan, mengidentifikasi kelemahan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Penilaian kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan dapat dilakukan atas permintaan pemangku kepentingan atau atas pendelegasian otoritas pengaturan kepada BPKP.

5. Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD

BLUD dikembangkan atas permintaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Satuan Kerja SKPD untuk memastikan pemenuhan infrastruktur dan upaya pemenuhan pengelolaan keuangan secara tertib, transparan dan akuntabel. Kami menyediakan jasa konsultasi untuk implementasi.

Saya memiliki bantuan pengelolaan uang BLUD:

1. Penyusunan Persyaratan administrasi BLUD.
2. Penyusunan Penatausahaan keuangan BLUD.
3. Penyusunan Sistem akuntansi BLUD
4. Penyusunan Biaya per unit layanan (unit cost)
5. Penyusunan SOP lainnya

6. Penugasan Lain

Salah satu kajian yang dilakukan adalah dalam pengembangan manajemen entitas. Pembicara tamu pada seminar dan lokakarya tentang elemen tata kelola perusahaan dan inisiatif lain untuk mempromosikan tata kelola perusahaan yang baik.

2.1.3.6 Koordinator Pengawasan dan Kelompok JFA Bidang Investigasi (INVES)

Kelompok Riset JFA bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan review dalam kegiatan penelitian. Ada banyak kegiatan penelitian di bidang pendidikan seperti:

1. Audit Investigatif
2. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
3. Pemberian Keterangan Ahli
4. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
5. Audit Penyesuaian Harga
6. Audit Klaim
7. Fraud Control Plan (FCP)
8. Pengkajian aspek pencegahan korupsi atas peraturan perundang-undangan yang terindikasi menjadi penyebab korupsi
9. Sosialisasi Anti Korupsi

2.1.3.7 Koordinator Pengawasan dan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP / P3A

Kelompok Pelaporan dan Program JFA dan Kelompok Pengembangan JFA/P3A bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, mengelola dan

melaksanakan kegiatan, menyiapkan rencana aksi dan program, menyiapkan bahan informasi kinerja, menyiapkan laporan berkala, memantau dan mengembangkan hasil program APIP (dan pengembangan jabatan) Auditor/Perwakilan Daerah JFA dan APIP).

Produk dan layanan di berbagai bidang seperti program dan laporan layanan, pengembangan JFA/P3A:

1. Menyiapkan bahan rencana/perjanjian kinerja di perwakilan;
2. Menyelenggarakan Diklat Teknis Substantif;
3. Menyelenggarakan Diklat Sertifikasi dan Pembinaan jabatan Fungsional Auditor
4. Pengolahan/Pengelolaan SIMA
5. Pembinaan dan Peningkatan Tata Kelola APIP.

2.1.3.8 Kelompok Jabatan Fungsional (JAFUNG)

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Aktivitas Magang

2.2.1 Tempat Pelaksanaan Magang

Magang MBKM dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Tepatnya berlokasi di Jalan Raya Semarang – Kendal Km. 12, Ngaliyan, Semarang. Penulis melaksanakan magang di Kantor Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah karena lokasi instansi ini mudah dijangkau oleh penulis

2.2.2 Waktu Pelaksanaan Magang

Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih empat bulan terhitung mulai tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan 18 Juni 2022.

2.2.3 Tata Tertib Magang

Tata tertib yang harus diikuti oleh peserta magang adalah sebagai berikut:

Jadwal magang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Hari kerja kantor BPKP 5 hari kerja dari senin hingga jumat pada tiap minggunya, kecuali terdapat hari libur nasional.

1. Jam kerja sesuai jam kerja kantor, yaitu:

- 1) Hari Senin : 08.00 – 16.30 WIB
- 2) Hari Selasa : 08.00 – 16.30 WIB
- 3) Hari Rabu : 08.00 – 16.30 WIB
- 4) Hari Kamis : 08.00 – 16.30 WIB
- 5) Hari Jumat : 07.00 – 17.00 WIB

Terdapat perubahan jam pulang pada saat Bulan Ramadhan yaitu Hari Senin

- Kamis pulang jam 15.00 WIB., Hari Jumat pulang jam 15.30 WIB.

2. Pakaian kerja sesuai aturan kantor, yaitu:

- 1) Hari Senin : Kemeja putih dan bawahan gelap
- 2) Hari Selasa : Kemeja putih dan bawahan gelap
- 3) Hari Rabu : Kemeja batik dan bawahan gelap
- 4) Hari Kamis : Kemeja bebas sopan dan bawahan gelap
- 5) Hari Jumat : Pakaian olahraga (senam pagi) dan kemeja batik

2.2.4 Kegiatan Magang

Pada hari pertama pelaksanaan magang, mahasiswa terlebih dahulu diarahkan dan diberi penjelasan mengenai Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan tata tertib magang termasuk jadwal jam kerja dan pakaian kerja oleh Bapak Widyatmono selaku Kepala Bagian Tata Usaha dan Bapak Djoko Moeljanto selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian. Pada hari berikutnya, diberikan arahan dan penempatan bidang selama melaksanakan kegiatan magang. Selama waktu pelaksanaan magang mulai tanggal 14 Februari sampai dengan 18 Juni 2022 mahasiswa ditempatkan di bagian Tata Usaha Sub Bagian Kepegawaian. Kegiatan magang dimulai pada hari ketiga yang pada saat itu beberapa mahasiswa magang mengikuti office tour dan diberi penjelasan tugas pokok dan fungsi masing - masing bidang oleh Korwas. Berikut beberapa aktivitas magang yang dilakukan mahasiswa antara lain;

Berikut kegiatan mahasiswa selama Magang MB-KM antara lain ;

1. Menginput data usulan pada web SIA-SN BKN

Deskripsi Kegiatan : Mahasiswa diberikan daftar pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang akan diinput pada web sias-instansi.bkn.go.id, kemudian mahasiswa mengetik nama pegawai atau NIP yang kemudian memasukan usulan pada inbox usulan. Pada inbox usulan tersebut semua pegawai diberikan usulan dengan deskripsi “ Tidak Ada Usulan” atau “Belum Ada Usulan”

2. Melakukan validasi gelar pegawai pada SK Kenaikan Pangkat Pegawai

Deskripsi Kegiatan : Mahasiswa diberikan daftar pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang sudah sesuai nama dan gelarnya, kemudian mahasiswa mencari berkas pada loker dosir kepegawaian dan mencari dokumen SK Kenaikan Pangkat Pegawai yang selanjutnya dicocokkan untuk gelar dan jabatan golongannya.

3. Melakukan update presensi karyawan

Deskripsi Kegiatan : Mahasiswa diberikan daftar pegawai yang sudah mengisi bit.ly ketika mengalami kendala absen atau gagal absen kemudian mahasiswa membuka web Layanan MAP dan menginput jam datang dan jam pulang pegawai.

4. Menginput data Kenaikan Gaji Berkala pegawai

Deskripsi Kegiatan : Mahasiswa diberikan dokumen SK Kenaikan Gaji Berkala kemudian membuka web layanan SMILE yang selanjutnya memasukan data baru jika keterangan pada web tersebut masih Inpassing.

5. Mencetak Penetapan Angka Kredit pegawai.

Deskripsi Kegiatan : Mahasiswa membuka web Sibijak.bkp kemudian mencari nama pegawai yang pada keterangannya sudah valid, selanjutnya memilih menu edit generate PAK dan mencetak dokumen tersebut. Selesai mahasiswa mencetak PAK selanjutnya dokumen tersebut diberikan kepada pegawai ampunan dan dimasukkan pada berkas dosir kepegawaian.

6. Menyusun lampiran untuk penerbitan Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan (SKPP) atau Pengakuan Gelar (PG).

Deskripsi Kegiatan : Mahasiswa diberikan dokumen pegawai kemudian membantu menyusun dengan lampiran berkas administrasi pendukungnya, antara lain; SK Kenaikan Pangkat terakhir (legalisir unit), Surat Ijin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan (legalisir unit), Ijazah dan transkrip nilai (legalisir asli Fakultas), dan Sertifikat Akreditasi Jurusan (legalisir asli Fakultas) .

7. Membuat Surat Masuk periode 1 Juli 2021 – 31 Desember 2021

Deskripsi Kegiatan : Mahasiswa diberikan berkas Surat Masuk tahun 2021 kemudian akan diinput untuk DUPAK Semester II Tahun 2021 untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021 sesuai dengan dokumen.

8. Melakukan input Pemrosesan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Lampiran Angka Kredit PMK Manajemen PNS pada DUPAK JFA

Deskripsi Kegiatan : Mahasiswa diberikan berkas KGB tahun 2022, kemudian melakukan input data berdasarkan berkas tersebut pada periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Data yang diperlukan yaitu Gaji Pokok Lama, Gaji Pokok Baru, Nomor Surat, Tanggal Surat, Keterangan Berlakunya perubahan Penetapan Kredit tersebut.

9. Membantu validasi Diklat Substansif 2022

Deskripsi Kegiatan : Mahasiswa diberikan berkas Diklat Substansif 2022 kemudian divalidasi pegawai yang sudah melakukan kegiatan diklat dari bulan Januari 2022 sampai Bulan April 2022. Validasi terhadap siapa yang mengikuti diklat dan kegiatan diklat apa yang dilakukan kemudian kegiatan tersebut berjalan selama berapa hari. Validasi ini dilakukan dalam rangka

memenuhi zona integritas yang dilakukan oleh audit pada bidang kepegawaian yang nantinya akan dilaporkan ke pusat.

10. Melakukan input data aplikasi peminjaman ruangan

Deskripsi Kegiatan: Mahasiswa melakukan input data peminjaman ruangan yang digunakan berdasarkan tanggal, jam dan kegiatan yang dilakukan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dengan tamu kunjungan maupun kegiatan intern kantor.

11. Menginput DUPAK 2021

Deskripsi Kegiatan : Mahasiswa diberikan data kemudian menginput dari data tersebut. Data terdiri atas uraian penilaian unsur lama yang diinput pada excel yang menggunakan rumus sehingga secara otomatis hasil akan keluar.

12. Melakukan validasi data presensi pegawai

Deskripsi Kegiatan : Validasi data ini hanya dapat dilakukan dimana pegawai mempunyai surat keterangan yang sudah mendapat acc dari kepala bidang maupun kepala perwakilan, kemudian mahasiswa menginput perbaikan data presensi pegawai agar tidak terjadi salah potong.

13. Memasukan data hasil penilaian PAK periode sebelumnya pada berita acara penilaian angka kredit.

Deskripsi Kegiatan : Mahasiswa diberikan berkas DUPAK, kemudian mahasiswa mencatat data pegawai dan hasil penilaian angka kredit periode sebelumnya. Unsur penilaian terdiri atas Pendidikan Sekolah, Angka Kredit Penjurusan terdiri dari Unsur Utama meliputi Pendidikan dan Pelatihan, Pengawasan dan Pengembangan Profesi kemudian juga Unsur Penunjang.

Adapun tugas tambahan yang diterima oleh mahasiswa, antara lain:

1. Membantu scanning berkas

Deskripsi Kegiatan : Mahasiswa memindai berkas pada alat scan kemudian disimpan dalam bentuk softcopy pada flashdisk.

2. Membantu menyusun dossier kepegawaian

Deskripsi Kegiatan : Mahasiswa diberikan daftar nama seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah kemudian menyusun berkas tersebut sesuai bidang dan pengampu dokumen tersebut berdasarkan urutan abjad daftar nama.

3. Membantu fotocopy berkas

Deskripsi Kegiatan : Mahasiswa diberikan tugas untuk memfotocopy berkas namun alat yang tersedia di subbagian kepegawaian mengalami kendala maka mahasiswa melakukan fotocopy pada ruangan subbagian umum.

4. Membantu memberikan nama pada cover berkas pegawai

Deskripsi Kegiatan: Mahasiswa diberikan daftar nama pegawai kemudian menempelkan pada sisi berkas agar mudah saat mencari berkas.

5. Membantu pada bagian receptionist.

Deskripsi Kegiatan : Mahasiswa membantu melakukan kegiatan menyambut tamu yang melakukan kunjungan ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah kemudian memberikan informasi melalui telepon yang disambungkan ke bidang yang berkepentingan. Kemudian jika terdapat surat masuk mahasiswa melakukan pencatatan pada Buku Surat.

BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan hasil magang saya pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah maka di dapatkan berbagai masalah terkait Good Corporate Governance, sebagai berikut:

3.1 Rendahnya Transparansi di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan selama magang, tingkat transparansi di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah masih rendah. Kendala pertama pada prinsip transparansi ini diketahui masih belum maksimalnya proses pembayaran dan pertanggungjawaban, adanya bukti kuitansi yang di curigai tidak riil pada SPJ Perjalanan Dinas.

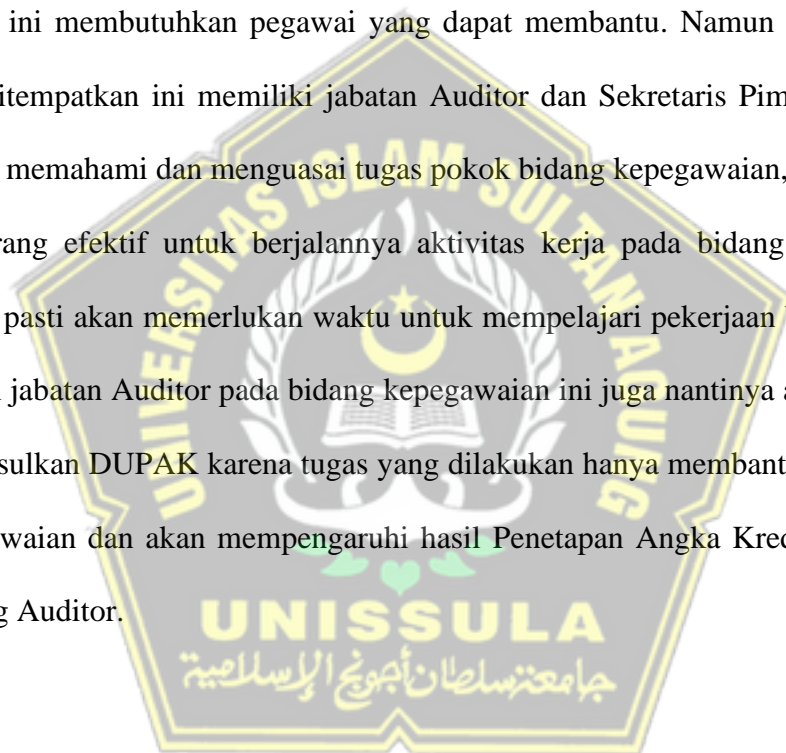
Kemudian belum maksimalnya pelayanan reservasi online. Kendala transparansi ini menurut saya masih kurang dalam hal kemudahan dan prosedur pelayanan. Reservasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang menjadi kendala ada di bagian resepsionis ketika terdapat telepon masuk dari luar beberapa kali telepon kantor tidak dapat menerima dikarenakan sambungan jaringan telepon kantor yang tidak stabil yang mengakibatkan panggilan telepon tidak sampai pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

3.2 Rendahnya Akuntabilitas di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan selama magang, tingkat akuntabilitas di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah masih rendah.

Ketidaksesuaian job deksripsi pegawai dengan jabatan pegawai. Dimana pegawai dengan jabatan Auditor dan Sekretaris Pimpinan melakukan tugas pada bidang kepegawaian.

Permasalahan yang di temui pada bidang kepegawaian dimana pada bidang tersebut semula kekurangan sumber daya manusia sehingga setiap pegawai pada bidang kepegawaian akan handle banyak tugas. Dengan hal tersebut tentu bidang ini membutuhkan pegawai yang dapat membantu. Namun pegawai yang akan ditempatkan ini memiliki jabatan Auditor dan Sekretaris Pimpinan dimana kurang memahami dan menguasai tugas pokok bidang kepegawaian, menurut saya ini kurang efektif untuk berjalannya aktivitas kerja pada bidang kepegawaian karena pasti akan memerlukan waktu untuk mempelajari pekerjaan baru. Pegawai dengan jabatan Auditor pada bidang kepegawaian ini juga nantinya akan kesulitan mengusulkan DUPAK karena tugas yang dilakukan hanya membantu pada bidang kepegawaian dan akan mempengaruhi hasil Penetapan Angka Kreditnya sebagai seorang Auditor.



BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1 Pengawasan

4.1.1. Definisi Pengawasan

Pemantauan adalah kegiatan praktis, dilakukan, dilakukan, atau diselenggarakan sehubungan dengan apa yang diinginkan, direncanakan, atau diperlukan. Dimungkinkan untuk menunjukkan sejauh mana persetujuan atau ketidaksepakatan tentang pengawasan dan mengapa (Setiawan, 2019). Peninjauan berhasil jika meningkatkan kinerja. Indikator seperti (Hidayat et al., 2008) merujuk pada orang-orang yang merasa didukung untuk mencapai visi dan misi secara efektif dan efisien. Anda dapat menciptakan lingkungan keterbukaan, integritas, partisipasi, dan akuntabilitas. Hal tersebut dapat menciptakan suasana saling percaya baik di dalam maupun di luar operasi organisasi. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas organisasi. Anda dapat meningkatkan efisiensi organisasi Anda. dan dapat mempromosikan pemerintahan yang efektif.

Proses pemantauan yang telah dilakukan BPKP selama ini dibagi menjadi tiga tahap: awal, tengah dan akhir. Pada tahap awal dan menengah, BPKP melakukan tindakan restriktif dan restriktif dan akhirnya bertindak represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi dan sosialisasi. Tindakan pencegahan diambil melalui bimbingan dan dukungan teknis. Di sisi lain, langkah represif juga dilakukan melalui audit investigatif.

4.2 GCG

4.2.1. Latar Belakang GCG

Latar belakang perlunya tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dapat dipahami dari segi praktik dan pembelajaran. Dari sudut pandang praktis, terbukti dari pengalaman Amerika Serikat, yang harus merestrukturisasi tata kelola perusahaan sebagai tanggapan atas kehancuran pasar tahun 1929. Tata kelola perusahaan yang buruk merupakan bagian integral dari krisis politik dan ekonomi Indonesia, yang dimulai pada tahun 2006. Nuansa tahun 1997 masih terasa sampai sekarang. Krisis keuangan di Amerika Serikat selama periode ini juga terkait dengan pelanggaran standar GCG dan beberapa skandal keuangan yang melibatkan manajemen perusahaan seperti Enron, WorldCom, dan Xerox. Itu mencontohkan kegagalannya. Pedoman GCG.

Secara akademis, kebutuhan akan tata kelola perusahaan yang efektif muncul dalam kaitannya dengan teori prinsipal dan agensi. Yaitu, untuk menghindari konflik antara prinsipal dan Agen. Konflik yang timbul dari berbagai kepentingan tidak boleh dianggap enteng. Sebagai badan hukum dibuat dan menjadi badan hukum yang terpisah dan independen, status badan hukum dan pemangku kepentingannya harus dilindungi oleh pengenalan GCG. Selain pendekatan model di atas, teori keagenan dan teori pemangku kepentingan, penelitian tentang masalah GCG dilakukan oleh para sarjana dan praktisi, teori stewardship, teori manajemen, dan lain-lain.

Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha

Milik Negara Peraturan Menteri Negara Badan Usaha No.: PER — 01/MBU/2011 diubah dengan Good Corporate Governance Pengenalan (Good Corporate Governance) Badan Usaha Milik Negara menekankan kewajiban BUMN untuk melaksanakan GCG secara berkala dan/atau mendasarkan operasionalnya pada prinsip-prinsip GCG, yang pada dasarnya bertujuan untuk mendorong efisiensi usaha dan akuntabilitas perusahaan untuk memberikan shareholder value. Bertindak sesuai dengan hukum dan nilai-nilai etika, dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang pemangku kepentingan lainnya.

4.2.2. Definisi Good Corporate Governance

Secara umum, istilah tata kelola perusahaan yang baik mengacu pada sistem manajemen dan pengaturan perusahaan, termasuk mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengatur perusahaan (definisi yang ketat) dan pertimbangan peningkatan "nilai-nilai" yang terlibat di dalamnya. mekanisme manajemen (lunak definisi). Tim GCG BPKP menyajikan definisi sederhana GCG yang mudah dipahami oleh orang awam:

"KOMITMEN, ATURAN MAIN, SERTA PRAKTIK PENYELENGGARAAN BISNIS SECARA SEHAT DAN BERETIKA"

4.2.3. Prinsip – prinsip Good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan yang baik membutuhkan lima prinsip: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keandalan. Lima prinsip diperlukan untuk mencapai tujuan ini, dan kelima prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut:

4.2.3.1. **Transparan (*Transparency*)**

Kejelasan berarti bahwa informasi harus dikomunikasikan secara tepat waktu dan akurat. Untuk memastikan objektivitas, perusahaan harus menyediakan informasi yang tepat yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (Kusmayadi et al., n.d.). Di sisi lain, sebagaimana dikemukakan oleh (Dwiyanto, 2014), transparansi harus menjamin efisiensi dalam penyediaan informasi hukum kepada publik dan dalam perolehan informasi yang akurat dan konsisten.

Indikator transparan menurut (Maani Dt, 2009) yaitu:

1. Tingkat keterbukaan
2. Kemudahan peraturan dan prosedur pelayanan
3. Kemudahan informasi

4.2.3.2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Akuntabilitas didefinisikan oleh (Daniri, 2005) sebagai transparansi peran organisasi perusahaan, struktur, sistem dan akuntabilitas untuk memastikan keberhasilan perusahaan. Menurut (Nengsih et al., 2019) Akuntabilitas adalah tanggung jawab yang berkuasa untuk mengendalikan yang berkuasa.

(KNKG, 2006), indikator akuntabilitas ditunjukkan dengan penetapan tugas dan tanggung jawab secara rinci serta adanya sistem pengendalian intern yang efektif.

4.2.3.3. Responsibilitas (*Responsibility*)

OECD berpendapat bahwa prinsip akuntabilitas ini menekankan adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Tujuan tata kelola perusahaan yang sukses dapat dicapai dengan memenuhi kepentingan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan, termasuk masyarakat umum, pemerintah, dan asosiasi industri.

Menurut Indeks Tanggung Jawab (KNKG, 2006), itu adalah praktik tanggung jawab sosial. CSR didasarkan pada konsep GCG sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. (Kelvianto & Mustamu, 2018)

4.2.3.4. Independen (*Independency*)

Kemandirian mengacu pada setiap situasi dimana perusahaan dikendalikan secara profesional, bebas dari benturan kepentingan, pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar perusahaan yang baik (TBK, 2020).

Oleh karena itu, menurut Indeks Independensi (KNKG, 2006), manajemen perusahaan dapat mandiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola perusahaan tanpa ada tekanan untuk mengambil keputusan yang tepat.

4.2.3.5. Terpercaya (*Trust*)

Menurut (Akbar & Parvez, 2009), kepercayaan tercipta ketika salah satu pihak percaya bahwa kerjasama yang dapat diandalkan dan integritas ada.

Sedangkan menurut Gefen dalam (Widjajanti, n.d.) Pengertian amanah, dalam arti amanah dan tanggung jawab, adalah kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipercaya. Kepercayaan, dengan demikian, adalah kesediaan satu pihak untuk membentuk kemitraan dengan pihak lain berdasarkan kepercayaan dan tanggung jawab..

Menurut (Robbins dan Judge, 2009) dalam (Permata, 2017) membahas lima aspek kunci dari konsep kepercayaan yang dapat digunakan sebagai metrik untuk mengukur kepercayaan.

1. Jujur

2. Surat kuasa

3. Bersatu

4. Setia

5. Terbuka

4.2.4. Manfaat Penerapan Good Corporate Governance

Menurut Manfaat Good Corporate Governance (FCGI, 2001):

- 1) Meningkatkan kinerja pemerintah dengan menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi lembaga dan melayani pemangku kepentingan dengan lebih baik.
- 2) Membuat pendanaan lebih murah dan lebih mudah dilonggarkan (karena faktor kepercayaan), yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan.

- 3) Mengembalikan kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Indonesia.



BAB V

METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Metode dan Jenis Penelitian

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini dikatakan kualitatif karena pada dasarnya bertujuan untuk memperlakukan objek sebagaimana adanya atau belum diolah dan hasil yang diharapkan bukanlah ukuran kuantitatif, melainkan fenomena yang diamati. Karena bergantung pada signifikansi dan kualitasnya Subyek penelitian adalah perwakilan BPKP dari Jawa Tengah.

5.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Sumber primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada agregator data seperti orang atau dokumen lain. Sumber data sekunder meliputi catatan wawancara tertulis dan transkrip wawancara yang dilakukan.

5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menggunakan metoda kualitatif, teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi.

- 1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan, tanya jawab, untuk mencapai suatu tujuan. Setelah subjek adalah staf dan pengunjung perwakilan BPKP Jawa Tengah, wawancara terstruktur dan siswa diberi daftar pertanyaan dan daftar pertanyaan yang akan membantu untuk memperoleh data dari subjek. Digunakan.

2) Observasi

Observasi kualitatif observasi kualitatif individual oleh perwakilan BPKP dari Jawa Tengah. Amati percakapan dengan subjek dan rekam anak berbicara dengan subjek.

3) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah merekam percakapan dengan subjek menggunakan perekam suara handphone.

5.4 Metoda Analisis Data

Analisis data adalah proses berkelanjutan yang melibatkan peninjauan data secara terus-menerus, mengajukan pertanyaan terperinci, dan menulis catatan singkat selama penelitian.

Metode analisis data kami adalah sebagai berikut.

1) Pengumpulan informasi

Pada tahap ini, mahasiswa memperoleh informasi dari hasil wawancara dan mengacu pada dokumen perusahaan.

2) pengurangan atau klasifikasi informasi;

Pada tahap ini, siswa mengumpulkan semua informasi dari wawancara dan dokumen perusahaan dan memilih data mana yang sesuai dengan apa yang ingin mereka pelajari. Ini tata kelola yang baik.

(3) Kategori

Pada tahap ini, mahasiswa akan menganalisis data yang diperoleh sesuai dengan lima prinsip tata pemerintahan yang baik: transparansi, akuntabilitas, akuntabilitas, kemandirian dan ketidakberpihakan dan mengelompokkan data yang ditemukan ke dalam setiap kategori atau prinsip.

4) Periksa kualitas informasi

Verifikasi memastikan bahwa data yang diterima benar-benar alami dan dapat dipercaya. Validitas data merupakan konsep validitas atau reliabilitas dalam penelitian kualitatif.

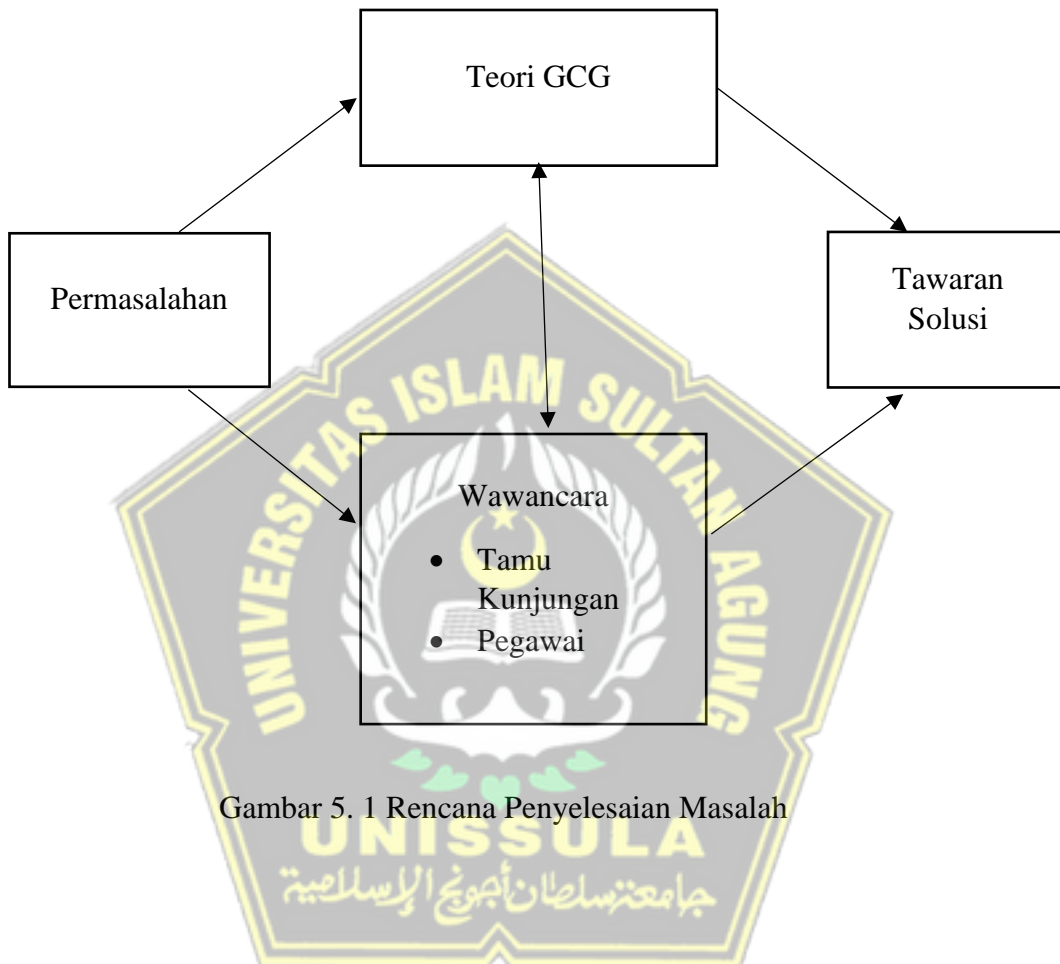
5) Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dari penelitian kualitatif adalah penemuan-penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Pada tahap ini kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal



Rencana Penyelesaian Masalah

Rencana penyelesaian masalah sebagaimana di jelaskan di Bab sebelumnya, maka di temukan metode penyelesaian masalah, sebagai berikut ;



Gambar 5. 1 Rencana Penyelesaian Masalah

BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisa teori yang akan digunakan dalam laporan ini menggunakan Teori GCG yang didekati dengan unsur-unsur GCG yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independen dan Terpercaya.

6.1 Rendahnya Tingkat Transparan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Permasalahan transparansi pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah ini ditunjukkan dengan adanya lampiran kuitansi spj atau surat pertanggung jawaban yang dicurigai tidak riil. Hal ini tidak sejalan dengan tingkat keterbukaan transparansi. Salah satu prosedur yang harus transparan dan mengharuskan terbuka adalah permohonan, pembayaran dan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Namun keadaan pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang belum sesuai. Maka, hal ini stake holder tidak memberikan informasi yang akurat sehingga dapat menimbulkan permasalahan apabila transparansi rendah akan memberikan peluang dan kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah memiliki prosedur baku pelaksanaan kegiatan atau SOP salah satu aturannya adalah :

“Pejabat/pegawai yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada sekretaris bidang berupa :

- *SPD rampung yang telah divisum oleh pejabat yan berwenang*

- *Bukti biaya riil moda transportasi*
- *Bukti biaya riil penggunaan fasilitas penginapan yang diperuntukan sesuai dengan golongan dan kelas taris penginapan*

Jangka waktu maksimal penyelesaian 2 hari setelah SPD berakhir “

Permasalahan selanjutnya adalah belum maksimalnya kemudahan peraturan dan prosedur pelayanan, Seluruh stakeholder diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi serta menyampaikan kritik atau saran. Bagi stakeholder yang ingin mengkontak, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menyediakan alternatif melalui Telp. : (024) 8662203, Faxmile. : (024) 8662201 maupun email jateng@bpkp.go.id. Namun untuk alternatif telepon, seringkali mengalami kendala jaringan hingga sambungan mengalami error atau bahkan terputus. Hal ini mampu menghambat aktivitas komunikasi yang penting informasinya antara stakeholder pada pihak Perwakilan BPKP Provisi Jawa Tengah.

Permasalahan ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber :

Pertanyaan : “Menurut Bapak / Ibu, apakah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah mampu menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, dan jelas sehingga mudah di akses untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi?”

Narasumber	Hasil Wawancara
Responden 1	Belum transparan, kuitansi yang dilampirkan saat proses spj ada yang tidak ada tanggalnya.
Responden 2	Reservasi online via telepon kantor sering error, jadi alternatif lain saya harus kontak pribadi.

6.2 Rendahnya Tingkat Akuntabilitas di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Permasalahan akuntabilitas pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah ini ditunjukkan dengan adanya ketidaksesuaian jabatan dengan jobdesk dan bidang kerja pegawai dimana terdapat pegawai dengan jabatan auditor ditempatkan pada bidang tata usaha sub bagian kepegawaian yang jobdesknya tidak sesuai dengan tugas sebagai pegawai auditor. Maka hal ini tidak sejalan dengan indikator akuntabilitas yaitu penetapan rincian tugas dan tanggung jawab menurut (KNKG, 2006).

Jika pegawai dengan jabatan auditor ditempatkan pada bidang tata usaha subbag kepegawaian maka tidak tepat karena kompetensi yang dimiliki pegawai tersebut sudah seharusnya ditempatkan pada bidang yang sesuai sehingga meminimumkan kinerja yang tidak efektif. Hambatan ini menjadi serius karena sudah seharusnya jobdesk yang ditanggung jawabkan harus sesuai dengan skill yang dimiliki pegawai. Pegawai dengan jabatan Auditor pada bidang kepegawaian ini juga nantinya akan kesulitan mengusulkan DUPAK karena tugas yang dilakukan hanya membantu pada bidang kepegawaian dan akan mempengaruhi hasil penetapan angka kreditnya sebagai seorang auditor.

Berdasarkan Peraturan Keputusan Kepala BPKP Tahun 2017 Perka Nomor 15 Th 2017 pasal 2 ayat 2:

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor pada Perwakilan BPKP terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntan Negara;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan Serta Pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Permasalahan ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber :

Pertanyaan: “Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana akuntabilitas kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah?”

Narasumber	Hasil Wawancara
Responden 1	Ada pegawai di subbagian kepegawaian yang masih tidak sesuai dengan jabatan dan jobdesknya.
Responden 2	Saya sebagai user merasa perlu lebih banyak dilakukan pendampingan atau bimbingan teknis terkait paket pekerjaan.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan permasalahan didalam pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun laporan ini penulis menemukan beberapa permasalahan atau hambatan yaitu terdapat dua prinsip yang tidak sesuai dengan teori Good Corporate Governance yaitu Transparansi dan Akuntabilitas

Pertama prinsip transparansi dapat diketahui belum sepenuhnya sesuai. Permasalahan diukur berdasarkan unsur indikator tingkat keterbukaan dengan diketahui bahwa adanya kecurigaan lempiran kuitansi yang tidak riil kemudian ada pula hambatan pada indikator kemudahan peraturan dan prosedur pelayanan bahwa reservasi online yang dilakukan sering mengalami kendala jaringan.

Kedua, prinsip akuntabilitas dapat dikatakan belum sesuai yang diukur berdasarkan unsur indikator penetapan tugas dan tanggung jawab dimana diketahui adanya ketidaksesuaian jabatan pegawai dengan penempatan bidang kerja sehingga jobdesk yang dikerjakan tidak sesuai dengan jabatan auditor.

Ketiga pada prinsip responsibilitas pada subjek penelitian dapat dikatakan sudah baik. Hal ini terlihat dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yaitu melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat dan pegawainya.

Keempat pada prinsip independen pada subjek penelitian dapat dikatakan sudah baik. Ditandai dengan tidak adanya benturan kepentingan antara bidang satu dan lainnya.

Pada prinsip terpercaya pada subjek penelitian dapat dikatakan sudah baik. Terlihat pada visi misi serta nilai – nilai luhur BPKP yang bercirikan good governance akan membangkitkan kepercayaan.

7.2 Rekomendasi

Secara umum hambatan dan tantangan yang dihadapi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah telah di paparkan, oleh karena itu penulis merekomendasikan mengenai solusi yang dapat dilakukan meliputi berbagai faktor antara lain :

7.2.1. Prinsip Transparan

1. Terkait lampiran kuitansi SPJ yang dicurigai tidak riil, Solusi yang perlu dilakukan adalah upaya pemberdayaan kepada pegawai dan membangkitkan kesadaran pentingnya berperilaku jujur dengan pemberantasan KKN seperti kegiatan sosialisai. Selanjutnya pegawai dapat menanamkan nilai moral pada diri sendiri dan selalu fokus dengan tanggung jawab pada pekerjaan. Hal ini sejalan dengan konsep transparansi yang merujuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para stakeholders (Maani Dt, 2009).
2. Rendahnya layanan reservasi online. Solusi yang perlu dilakukan adalah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dapat menciptakan aplikasi online untuk

reservasi. Diketahui untuk menghubungi pihak kantor pada web terdapat informasi kontak hanya terdapat alternatif telepon kantor, email dan fax, pilihan tersebut dirasa kurang cepat dalam pelayanan karena masih terdapat kendala. Selanjutnya kedepannya bisa dibuatkan semacam aplikasi dengan pilihan menu yang mempermudah kinerja. Tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud bila dalam praktik penyelenggaraan dilakukan dengan baik pula, serta pemerintah harus memberikan pelayanan terbaiknya demi terwujudnya praktik pelayanan yang transparan.

7.2.2 Prinsip Akuntabilitas

Posisi dan meja kerja karyawan menghadapi ketidaksesuaian. Solusinya praktis, mengembangkan keterampilan karyawan berdasarkan di mana mereka ditempatkan di dunia kerja. Itu juga dapat diputar ke area di mana auditor memenuhi syarat. Terkait dengan konsep akuntabilitas, sebagai prinsip yang mengatur tindakan dan tanggung jawab gubernur dan pengurus perwakilan BPKP di Jawa Tengah dapat dipertanggungjawabkan. Menerapkan prinsip akuntabilitas untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari pemisahan kewenangan dan mengurangi permasalahan kelembagaan yang timbul dari perbedaan kepentingan (Maheswari et al., 2020).

BAB VIII

REFLEKSI DIRI

8.1 Hal-Hal Positif yang Relevan Dengan Magang

Poin bagus yang saya dapatkan dalam pelajaran juga bertepatan dengan magang saya. Dengan kata lain, saya sering berkolaborasi dengan orang lain, dan komunikasi selalu ada di semua aspek organisasi. Saya sangat menikmati hari pertama karena itu adalah pengalaman baru.

Penulis juga diberi kesempatan untuk berkontribusi pada pekerjaan sejalan dengan fokus utama konferensi. Kontak dengan penulis dan staf atau karyawan Kantor Perwakilan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan Jawa Tengah sangat dianjurkan. Saya berharap hubungan baik ini dapat dipertahankan, terjalin komunikasi yang baik antar manusia, dan kesalahpahaman dapat dihindari. Contoh komunikasi yang dapat dikomunikasikan selama magang antara lain saat karyawan memberikan instruksi tentang tugas dan saat berkomunikasi dengan karyawan.

Praktik semacam itu memungkinkan penulis menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Pengalaman seperti ini sangat bisa mengajarkan dan memperkuat kemandirian seorang penulis. Penulis tidak hanya mandiri, tetapi juga mengembangkan rasa tanggung jawab melalui kegiatan magang.

8.2 Rencana Perbaikan atau Pengembangan Diri, Karir dan Pendidikan

Rencana peningkatan masa depan kami untuk penulis adalah meningkatkan kepercayaan diri mereka. Terutama saat Anda pergi ke dunia luar, penting untuk tidak melupakan rasa percaya diri Anda. Karena kurangnya kepercayaan diri mencegah Anda melakukan pekerjaan Anda. Selain itu, Anda akan semakin meningkatkan self-efficacy Anda, mempelajari apa yang perlu Anda persiapkan sebelum memasuki tempat kerja yang sebenarnya, dan bekerja setiap hari untuk menjadi yang terbaik bagi diri Anda dan lingkungan di sekitar Anda.



DAFTAR PUSTAKA

- Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI). (2001). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance). Jakarta: Pengarang.
- Kelvianto, I., & Mustamu, R. H. (2018). 287187-Implementasi-Prinsip-Prinsip-Good-Corpor-E6724F2F. *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Untuk Keberlanjutan Usaha Pada Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu*, 6(1–2), 1–2. <https://media.neliti.com/media/publications/287187-implementasi-prinsip-prinsip-good-corpor-e6724f2f.pdf>
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (n.d.). *GOOD CORPORATE CORPORATE*.
- Maani Dt, K. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Demokrasi*, no 1(VIII), 48.
- Maheswari, A. G., Murwadi, T., & Suwandono, A. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas (Accountability) Dan Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility) Good Corporate Governance (Gcg) Terkait Perjanjian Sriwijaya Air Travel Pass (Sjtp). *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i1.3273>
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1–18.

- Nengsih, W., Adnan, F., & Eriyanti, F. (2019). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 112–124. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i2.26>
- Permata, R. C. (2017). *Pengaruh Kepercayaan dan Komitmen Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah di PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Palembang*. 1–101.
- Setiawan, A. (2019). Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 265. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2002>
- Suseno, A. (2010). Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Ilmu Admnistrasi Dan Organisasi*, 17(1), 15–30.
- TBK, P. (2020). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan. *Repository.Umsu.Ac.Id*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7784>
- Widjajanti, K. (n.d.). *GAYA KEPEMIMPINAN DAN GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EXCELLENT SERVICE DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT*. 270–284.